

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan hasil pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Barito Utara selama Triwulan I Tahun 2026, secara umum menunjukkan tren kenaikan harga (inflasi) dari minggu ke minggu.

Pada bulan Januari 2026, IPH mengalami kenaikan bertahap dari 0,24 pada minggu ke-2 menjadi 0,42 pada minggu ke-4. Komoditas penyumbang utama pada periode ini antara lain bawang merah, beras, bawang putih, dan jeruk.

Memasuki bulan Februari 2026, tekanan inflasi semakin meningkat dengan IPH mencapai 0,72 pada minggu ke-4. Kenaikan ini didorong oleh komoditas daging ayam ras, cabai rawit, bawang putih, serta jeruk.

Pada bulan Maret 2026, IPH masih menunjukkan tren tinggi meskipun mulai melandai, yaitu dari 0,74 pada minggu ke-1 menjadi 0,64 pada minggu ke-2. Komoditas dominan pada periode ini antara lain daging ayam ras, cabai rawit, bawang putih, dan gula pasir.

Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Idulfitri, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kenaikan harga lanjutan apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan IPH tersebut, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Barito Utara antara lain:

1. Tingginya fluktuasi harga pada komoditas pangan strategis (cabai, bawang, daging ayam ras)
2. Ketergantungan pasokan dari luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi
3. Peningkatan permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan
4. Belum optimalnya pelaporan dan pemantauan melalui aplikasi Wasinflasi
5. Keterbatasan intervensi harga secara cepat pada saat terjadi lonjakan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan berbagai upaya strategis melalui sinergi antara kepala daerah dan perangkat daerah terkait, antara lain:

1. Pelaksanaan operasi pasar dan sidak pasar yang dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah bersama OPD terkait, khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idulfitri, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
2. Penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta survei harga pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2026 di beberapa kecamatan dan desa.
4. Pelaksanaan operasi pasar murah oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) bersama stakeholder terkait dari bulan Januari sampai dengan Maret 2026 di berbagai lokasi, kecamatan, dan desa.
5. Pemantauan harga dan stok serta pelaksanaan sidak ke gudang Bulog yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan stakeholder terkait untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Barito Utara pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum telah berjalan melalui berbagai kegiatan intervensi, seperti operasi pasar, bantuan pangan, pemantauan harga dan stok, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH), upaya yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya mampu menahan laju kenaikan harga, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Hal ini tercermin dari tren IPH yang terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari dan awal Maret 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengendalian inflasi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya permintaan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idulfitri, keterbatasan pasokan, serta ketergantungan distribusi dari luar daerah.

Di sisi lain, pelaksanaan intervensi pasar dan kegiatan pengendalian lainnya telah memberikan dampak dalam menjaga stabilitas harga agar tidak mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Namun, intensitas dan jangkauan pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan merata.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan harga pada Triwulan I Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya menjelang hari besar keagamaan.
2. Penguatan kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan komoditas strategis.
3. Optimalisasi pemantauan harga dan ketersediaan stok secara berkala.
4. Peningkatan intervensi distribusi, termasuk dukungan transportasi dari APBD.
5. Penguatan sektor pertanian dan pengembangan komoditas pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.